

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

kriminalitas

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kasus Pemalsuan Uang

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Kasus Pemalsuan Uang adalah banyaknya perkara kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu terhadap alat tukar menukar.
- Kasus Pemalsuan Uang adalah suatu perkara kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu terhadap alat pembayaran yang sah.
- Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.
- Pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
- Uang adalah alat pembayaran yang sah.
- Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan.

RUJUKAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344-345
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

RUMUS

-

WALI DATA

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

UKURAN

Jiwa

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya kasus pemalsuan uang yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Banyaknya kasus pemalsuan uang di suatu wilayah menunjukkan rendahnya pengendalian diri masyarakat serta pengawasan pemerintah terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

KETERANGAN

- Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan

- sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

